



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Berkas dan Tsk Korupsi BPBD Dilimpahkan**

**KOTA BINTUHAN** - Setelah dinyatakan lengkap oleh penyidik Kejari Kaur dan juga Kejati Bengkulu kemarin JPU mulai melimpahkan tersangka kasus korupsi BPBD tahun 2011 dengan anggaran Rp 17 miliar untuk semua kabupaten di Bengkulu. Dengan tersangka AM (39) warga Kabupaten Kaur yang juga Direktur PT Pulau Batu Intan. Yang lama menjadi

AM sempat masuk DPO Polda Bengkulu yang berhasil diamankan oleh anggota Polda Bengkulu dan Polres Kaur pada awal Desember 2019 yang lalu di Kabupaten Kaur.

Berkas tersangka kemarin (11/3) oleh jaksa penuntut umum (JPU) yang juga Kasi Pidsus Kejari Kaur Alman Noveri, SH, MH sudah dilimpahkan ke pihak Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu. Untuk selanjutnya kasus yang menimpa AM ini akan segera masuk proses persidangan dalam waktu dekat.

Kepada **RB**, Kajari Kaur Tati Vain Sitanggang, SH, MH melalui Kasi Pidsus Alman Noveri, SH, MH mengatakan kasus korupsi tersebut berupa pembangunan yang menggunakan dana BPBD Provinsi tahun

2011, gedungnya ada di Kaur. "Berkas AM sudah siap dan sudah kita limpahkan mungkin tidak lama lagi akan kita gelar sidang di PN Tipikor terkait kasus BPBD tahun 2011 yang lalu," kata Noveri.

Untuk diketahui AM, sudah lebih kurang 6 tahun menjadi DPO dalam kasus korupsi pembangunan fasilitas umum BPBD di Kaur tahun 2011 oleh Polda Bengkulu. Pada akhir tahun 2019, tersangka pulang ke Kaur dan saat sedang berada di rumah istri mudanya ditangkap oleh anggota Polda dan Polres Kaur. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Kaur Iptu Ahmad Kairuman dan anggota Tipikor Polres Kaur.

Tanpa perlawanan tersangkadibawa ke Mapolda Bengkulu untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Karena AM merupakan tersangka ke delapan dalam kasus pembangunan gudang logistik peralatan penanggulangan bencana di BPBD tahun 2011. Dengan anggaran total Rp 17 miliar dan untuk wilayah Kaur sekitar Rp 3 miliar. Dari nilai Rp 3 miliar sudah dicairkan Rp 1,89 miliar dan ada kelebihan bayar Rp 353 juta akibat pemutusan kontrak waktu itu. (**cik**)